

**REKAPITULASI JUDUL TESIS
KONSENTRASI HUKUM PIDANA**

NO	NAMA	NPM	JUDUL TESIS
OKTOBER 2002			
1	TUKINU, S.H	0010120015	BATAS-BATAS KEBEBASAN DAN PEDOMAN HAKIM DALAM PENERAPAN PIDANA
APRIL 2003			
2	PRANANDYA SUBIYAKTO, SH	0010220031	KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT
OKTOBER 2003			
3	RAIDUN, S.H	0010220032	FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA DALAM MENAGGULANGI MAL PRAKTEK MEDIK DI BIDANG KEDOKTERAN
4	SUYONO, S.H	0010220033	FUNGSIONALISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN HUBUNGAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIIL (PNS) DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH YANG MEMPUNYAI SANKSI PIDANA DI PROPINSI JAWA TENGAH.
5	IMAM SANTOSO, S.H	0110120043	KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus di Kota Semarang)
6	SRI WULANDARI, S.H	0110120044	FUNGSIONALISASI SISTIM PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PEMIDANAAN
7	WIDJIJONO, S.H	0110120045	KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN
APRIL 2004			
8	WAHYU SUMARNO, S.H	0010220034	PROFESIONALISME DAN KEMANDIRIAN POLISI DI BIDANG PENYIDIKAN SEBAGAI SUB SYSTEM PERADILAN PIDANA
9	PUJI, S.H	0010120012	KEBIJAKAN LEGISLATIF DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI DAN APLIKASINYA

10	FAJAR MUFTI, S.H	0010220030	TINJAUAN KRITIS TERHADAP BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
OKTOBER 2004			
11	ALOYSIUS TOTOK SUPARTONO, SH	0210220083	KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI BIDANG MEREK
12	BAMBANG SUGIARTO, SH	0210220084	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN KEKERASAN YANG BERAKIBAT MATI
13	SLAMET SUSANTO, SH	0210220088	KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENAGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN PENGANGKUTAN KAYU ILEGAL MENURUT UU NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN
14	SUMADI, SH	0210220089	KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN PELAYARAN MENURUT UU NO. 21 TAHUN 1992 TENTANG PELAYARAN.
APRIL 2005			
15	KASTUBI, S.H	0010120011	KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEMBUJUK (UITLOKKER) SEBAGAI BENTUK PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
16	BAMBANG DWI HARTOYO, SH	0110220054	KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI KENAKALAN ANAK-ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1997
17	JUHARI, SH	0110220055	KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ABORTUS PROVOKATUS KRIMINAL
18	NANDA RIKO HENDY TOERINO, SH	0210220087	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
19	ZABIDIN, SH	0210220091	KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (DALAM PENANGGULANGAN) TINDAK PIDANA PERKOSAAN DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA
20	SUGIYONO, SH	0310120102	PERKEMBANGAN SISTEM PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL.
NOVEMBER 2005			
21	DRS. REDYANTO MURAZA	0310220115	PENANGGULANGAN PEMBOBOLAN KARTU KREDIT MELALUI INTERNET DENGAN HUKUM PIDANA

22	DRA. SUCI ROCHAYATI	0310220116	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WANITA TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004
23	SUHARTONO, SH	0310220117	BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP.
APRIL 2006			
24	PIETRUS WAINE, SH	0010220039	PENGATURAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN PERKARA PIDANA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PRAPERADILAN HAK-HAK TERSANGKA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 / 1981.
25	ASNAWI, SH	0310210135	KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK SUBSIDI PEMERINTAH.
26	HARRY MARCEL, SH	0310210139	ASPEK HUKUM PIDANA DALAM PEMANFAATAN KAYU JADI BUKAN MILIK NEGARA
27	SIMON KARTONO, SH	0310230163	EKSISTENSI REKONSTRUKSI SEBAGAI SARANA MEMPERKUAT ALAT BUKTI GUNA MENGUNGKAP TINDAK PIDANA
28	SUKIYATNO, SH	0310210172	PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA OLEH PENYIDIK POLRI DITINJAU DARI ASPEK ASASI . MANUSIA
29	ARDI SURYANTO, S.H	0411220196	SINKRONISASI KEBIJAKAN LEGISLATIF TENTANG KEWENANGAN PENYIDIKAN PERKARA PIDANA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA YANG INTEGRAL.
NOVEMBER 2006			
30	ABDUL HAKIM, SH	0110220053	LEMBAGA PRAPERADILAN SEBAGAI SARANA KONTROL TERHADAP PENYELENGGARAAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PELAKSANAAN HAM
31	LILIK SETIYAWAN, SH	0310210142	KINERJA KEJAKSAAN NEGERI DALAM MENANGANI PERKARA PIDANA
32	ISNAWAN, S.H	0410120179	PEMBINAAN TERPIDANA PENJARA SEBAGAI UPAYA RESOSIALISASI NARAPIDANA
33	SETIYOWATI (ATIEK), S.H.	0410120182	PERKEMBANGAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA.
34	BAMBANG PRAJITNO, S.H.	0410220202	KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KENAKALAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 1997

APRIL 2007			
35	SUWIRJO, S.H	0410120185	KEDUDUKAN PENINJAUAN KEMBALI SEBAGAI UPAYA HUKUM LUAR BIASA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
36	MOCH. SUTOPO, S.H	0410220205	KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN UJI KENDARAAN BERMOTOR.
37	DJOKO SUTRISNO, S.H	0510120231	PERANAN HUKUM PIDANA DALAM PELANGGARAN TERHADAP MEREK MENURUT UNDANG-UNANG NOMOR : 51 TAHUN 2001
38	MASLURI, SH	0510120235	SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG DAPAT BERIMPLIKASI DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI
OKTOBER 2007			
39	MARYONO, S.H	0410120181	TINDAK PIDANA KORUPSI DIKALANGAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PROSES PERADILAN PIDANA.
40	ESTININGSIH, S.H	0410220203	KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1997.
41	BROTO HASTONO, S.H.	0510220250	DILEMA UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN TERAKHIR SELAIN MAHKAMAH AGUNG
42	MUHAMMAD NUROHIM, SH	0510120236	PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI.
43	EDWAR RACHMANTO, S.H	0510220251	PERANAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA PENJARA DALAM PERKARA PIDANA TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
44	SUBAMBANG, S.H.	0510220254	IMPLEMENTASI PIDANA DENDA DALAM PEMIDANAAN ANAK
45	SUKIYONO, S.H	0510220255	ANCAMAN PIDANA SEBAGAI SALAH SATU SARANA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA.
APRIL 2008			
46	PURNOMO, S.H	0010120013	BAGAIMANA EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SANKSI PIDANA DALAM UU. NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.
47	SUDARYANTO, S.H	0410120184	KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA

			LINGKUNGAN HIDUP
48	AHMADI, S.Ag	0310210170	PENYALAHGUNAAN WEWENANG PENYIDIK POLRI DALAM PROSES PENYIDIKAN DALAM PERSPEKTIF HAM
49	SUMARYUDI, SH	0510120238	KEBIJAKAN APLIKASI DALAM PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
50	MUHARSUKO WIRONO, S.H	0510220253	HAK IMUNITAS ADVOKAD DALAM MENANGANI PERKARA PIDANA
51	RADEN ARSADI KABUL SAFRIANTO, SE	0610120267	FUNGSI VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MENURUT KUHP
52	YUDI PURNOMO, S.H.	0610110276	PENYELESAIAN SENGKETA PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
53	KURNIA HADI, S.H, SIK	0610120268	PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS PENANGANAN PENYIDIK POLRI DI POLDA JAWA TENGAH).
54	MAHA MATAHARI EDDY PURNOMO, SE	0610120269	PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENYIDIKAN PERKARA PIDANA
55	DRA. UNTUNG LUKENI	0610120271	LEMBAGA PRA PERADILAN SEBAGAI UPAYA KONTROL TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
56	TOYIB HANDAYANI, S.Kep	0610110296	KESALAHAN ATAU KELALAIAN TENAGA MEDIS DALAM TINDAKAN TERAPEUTIK DI PELAYANAN KESEHATAN
OKTOBER 2008			
57	MULYONO, SH	0610120264	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING BERDASARKAN UU. NOMOR : 19 TAHUN 2004 JO UU. NOMOR : 41 TAHUN 1999
58	ABDUL KHOLIQ, SH, Sp.N	0610220306	TINDAK PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN PROFESI NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM PEMBUATAN AKTA
59	BUDI RAHMADI, SH	0610220307	PROSEDUR PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA ASUSILA TERHADAP WANITA YANG TIDAK BERDAYA OLEH PENYIDIK POLRI
60	DRS. DEDY SUNARDI, SH	0610220308	IMPLEMENTASI PELEPASAN BERSYARAT MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM SISTEM PEMBINAAN PEMASYARAKATAN

61	R. JANU SUPRIYANTO, SH	0610220310	PENERAPAN SANKSI PELANGGARAN KELEBIHAN MUATAN PADA PENGANGKUTAN BARANG OLEH PENYIDIK PNS DI JEMBATAN TIMBANG WILAYAH JAWA TENGAH
62	MIMI SUMIATI, SH	0610220311	PERANAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN LALU-LINTAS UJI KENDARAAN BERMOTOR.
APRIL 2009			
63	MUHIYAR, SH	0610120270	PENERAPAN ASAS PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN OLEH UU. NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.
OKTOBER 2009			
64	SANG KETUT MUDITA, SH	0710220352	KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI
65	YUNIE PRAWESTI, SH	0710220353	PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN YANG BERKEADILAN GENDER
66	TULUS IKHLAS PAMODJI, SH	0710220361	EKSISTENSI POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
67	ADITYA ARIBOWO, SH	0710220362	POLITIK KRIMINAL TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA
68	EKO SUTIKNO, SH	0710220366	KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
69	ABDUL BASIR, SH	0710220369	KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI BIDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
70	ANA MARIA RETNOWATI, SH	0710220375	EFEKTIFITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN FISIK PSIKIS DAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA
71	DIAN WULANDARI, SH	0710220383	PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGOTA DPRD OLEH KEJAKSAAN NEGERI KUDUS (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kudus)
72	MOH. YASIN JOKO PRATOMO, SH	0811120412	EKSISTENSI PENYIDIK KEJAKSAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
APRIL 2010			
73	JAMIUN, SH	0410220204	IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR : 15 TAHUN 2003 TENTANG

			PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM MENANGGULANGI TERORISME DI JAWA TENGAH
74	EDI RIYANTO, SH	0710220368	KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DENGAN SARANA KOMPUTER.
75	YOHANES IKO HERMAWAN PRASETYANTO, SH	0710220382	PENGGUNAAN HAK IMUNITAS DAN PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI ADVOKAT DALAM PERKARA PIDANA.
76	FEBRI ANGGORO PURNOMO, SH	0810120393	KEBIJAKAN GRASI DALAM PUTUSAN PIDANA MATI
77	HENDRI SUJOKO, SH	0810120408	PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR : 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
OKTOBER 2010			
78.	HERMAWAN SULISTIYO WIDODO, SH	0210220085	ANALISIS YURIDIS DUALISME PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA.
79.	HERIYANTO, SH	0810120394	REMISI SEBAGAI HAK ASASI NARAPIDANA DAN IMPLIKASINYA DI INDONESIA
80.	AKHWAN NADZIRIN, SH	0810220420	PENEGAKAN HUKUM TERPADU DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009.
81.	ABDOEL CHASIEB, SH	0810220453	TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA ANAK YANG MENJALANI PIDANA DI LAPAS.
82.	DEDE MUHTAR, SH	0810220454	TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI.
83.	ESTINI DYAH ERAWATI, S.Sos	0810220456	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR : 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.
84.	MUGIYONO, S.Sos, SH	0810220458	TINDAKAN SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA PENJARA BAGI ANAK NAKAL YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA.
85.	PRI BAWONO, SH	0810220461	PERANAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KEPOLISIAN RESORT DEMAK.
86.	ZAENAL ARIFIN, SH	0810220470	PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERORIS DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL DI DEN 88 AT POLDA

			JAWA TENGAH.
87.	BUDIYONO, SH	0810220472	PERAN FORUM KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAKAT (FKPM) DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA.
88.	SUTEDJO, SH	0810220476	KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MEMFORMULASIKAN DAN MENGAPLIKASIKAN UNDANG-UNDANG NOMOR : 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI DEMAK.
APRIL 2011			
89	IRA ROSALIN, SH	0810120396	KEBIJAKAN PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG.
90	DRS. AGUS SADONO	0810220419	PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN NARKOBA DI - WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU.
91	DENI EKA PRIYANTORO, ST	0810220421	PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI WILAYAH HUKUM DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAERAH JAWA TENGAH.
92	ENGGAR SETYANINGRAT, SH	0810220422	IMPLIKASI YURIDIS PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA.
93	EDDY NAZMUDIN, SH	0910120485	KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA CUKAI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT.
94	MAROJAHAN LUMBAN GAOL, SE, SH	0910120505	KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI WILAYAH JAWA TENGAH.
95	HERONIMUS SUGIYANTO, SH	0910120509	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK NAKAL DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAK-HAK NAK DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI DEMAK.
OKTOBER 2011			
96	SETYA BUDI WASPADA, SH	0810220425	KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR : 35 TAHUN 2009
97	BAIHAQI,SH	0910220556	KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN PIDANA DENDA TERHADAP TINDAK PIDANA LALU LINTAS JALAN.
98	FAJAR PURWAWIDADA, SS	0910220559	IMPLEMENTASI PIDANA MATI PADA TINDAK PIDANA TERORISME

99	KISWORO, SH	0910220562	DISPARITAS PIDANA DALAM PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.
100	MUHAMAD SAJUDDIN, SH	0910220566	KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR)
101	SARDOYO, SH	0910220568	PROSES PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SEMARANG
APRIL 2012			
102	EDY SUBROTO, SH	0810220423	KEBIJAKAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN SANKSI TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR
103	GUSTAL ARTHON JAYA, SH	0910120486	KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI POLRES JEPARA.
104	MURDIYONO, SH	0910120489	ANALISA YURIDIS TENTANG PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
105	SUGENG, SH	0910220552	AUDIT KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
106	ABDUL AZIZ, SH	0910220553	PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
107	AGUS CHARIR, SH	0910220555	PROSES PERADILAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM DEMAK.
108	BAMBANG SETYO WIDJONARKO, SH	0910220557	KEBIJAKAN APLIKASI HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
109	M. MUNIR, SH	0910220564	IMPLEMENTASI PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI SMG
110	SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH	0910220570	PEMBUKTIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Tindak pidana Korupsi)
111	HARNI, SH	1010110603	KEBIJAKAN PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING.

112	UTUH NUGROHO TRI ANTORO, SH	1010110609	PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
113	ABDUL MUNIF, SH	1010120618	KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENADAHAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
114	AGUNG SULISTYA, SH	1010120619	PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SEMARANG
115	DEDDY NURAGA PAMUNGKAS, SH	1010120621	KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
116	JHON HALASAN BUTAR-BUTAR, SH	1010120623	PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TIPIKOR SEMARANG.
117	KARNO, SH	1010120624	EKSISTENSI PENYIDIK POLRI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA
118	MIFTACHUL ARIFIN, SH	1010120626	KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN ANAK DARI TINDAK PIDANA KESUSILAAAN
119	Rr. NOERMA SOEJATININGSIH, SH	1010120628	KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA DALAM PERKARA PIDANA BAGI TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAK AZASI MANUSIA.
120	SAPTOHADI,S.Pd	1010120629	PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA GRATIFIKASI
121	SUWASANA, SH	1010120630	KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN
OKTOBER 2012			
122	BAWONOADJI,ST	0910120483	KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERHADAP PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSIRADIO KHUSUS PENYIARAN TANPA IZIN.
123	BUDI AGUS SETIAWAN,SH,SIK	0910220558	PEMIDANAAN TERHADAP PELAKUTINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI BREBES.
124	INDRA ROMANTIKA H, S.Kom	0910220561	PELAKSANAAN IDENTIFIKASI NARKOBA SEBAGAI BARANG BUKTI DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI LABORATORIUM FORENSIK CABANG SEMARANG.

125	ANJAR LINDU WIJAYADI, SH	1010120620	STRATEGI PENEGAKAN HUKUM DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESELAMATAN LALU LINTAS DAN MEWUJUDKAN MASYARAKAT PATUH HUKUM
126	ERMA SARI SUWARNO P,SH	1010120622	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP DELIK KEKERASAN PSIKIS MENURUT UU RI NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.
127	CHANDRA NOVYARDY IRAWAN, SH	1010220674	TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN LEGISLASI DALAM MELAKUKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN BATANG.
128	DANANG MUHAMMAD Z.F,SH	1010220675	TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN ALAT BUKTI REKAM ELEKTRONIK (CCTV) DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERAMPOKAN.
129	DAVID ROMIYANTO, SE	1010220676	MEMBANGUN CITRA POLISI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS DI POLRES UNGARAN.
130	LAZUARDI LUMBANTOBING, SH	1010220680	KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 85 KUHP DALAM KAITANNYA DENGAN EFEKTIFITAS PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI.
131	SAIFRUDIN, SH	1010220685	TINJAUAN YURIDIS PENYIDIKAN OLEH POLRI TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
132	SENO HARTANTO, SH	1010220687	MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS RINGAN DI LUAR PENGADILAN.
133	YASRI, SH	1010220690	PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KELUARGA DAN BUKAN ANGGOTA KELUARGA
134	YOSEPAJAR DWIWANTORO, SH	1010220691	PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA UNJUK RASA ANARKIS
135	YOYOK AGUS WALUYO, SH	1010220692	PROSES DAN HAMBATAN INAFIS POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN.
APRIL 2013			
136	GIGIH HERMAWAN, SH	1010220678	ANALISIS HUKUM TERHADAP PROBLEMATIKA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA OLEH ANAK DI POLWILTABES SEMARANG.
137	HARTONO, SH	1010220679	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

138	ARIE IMAN PRASETYA,SPd	1110120729	REHABILITASI TERHADAPANAKPENYALAHGUNA NARKOTIKA DI RUMAH DAMAI CEPOKO GUNUNGPATI KOTA SEMARANG.
139	IMAN KURNIAWAN, SH	1110120732	KEBIJAKAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENGUNGKAP KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT BLORA.
140	IR.MOHAMAD JUSUF,SH, SU	1110120735	URGENSI PENERAPAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF
141	ZULKIFLI KABAKORAN, SH	1110120739	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI PIDANA DENDA DI INDONESIA
142	SOEDJIARNO BROTO, SH	1110120764	TINJAUAN YURIDIS SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
143	FX. SUJADI, SH	1110120767	TANGGUNG JAWAB PROFESI ADVOKAT SELAKU PEMEGANG KUASA KLIEN DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM
OKTOBER 2013			
144	BRAM BUDI NURCAHYO, SE, AKT	1010210713	KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DALAM PERKARA PIDANA BAGI TERDAKWA ANAK SECARA CUMA-CUMA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)
145	PUDJO MARDJOKO, SE,SH AKT	1110120740	KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR (ILLEGAL LOGGING).
146	ENDAR SUSILO,SH	1110220762	KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
147	SIANTO, SH	1110220793	PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KASUS ILLEGAL LOGGING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2004 DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
148	MOCHAMAD CHAYAT, SH	1110220809	PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERINTAH REHABILITASI TERHADAP PENGGUNA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
149	MAHMUDA, SH	1110220813	DISPARITAS PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG.
150	SRI MULYANI, SH	1110220814	PELAKSANAAN TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KEDUNGPANE SEMARANG.

APRIL 2014			
151	Ali Muhtarom, SH	0810220471	Efektivitas Undang-Undang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dalam Mendapatkan Jasa Layanan Bantuan Hukum
152	Gatot Joko Prakoso, SH	1110220783	Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Kabupaten Jepara
153	I Gde Wikrama Yuda, SH	1110220784	Problematika Penegakan Hukum dan Solusinya Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Jawa Tengah
154	Jumani, SH	1110220785	Pra Peradilan Sebagai Fungsi Kontrol Terhadap Proses Penyidikan Oleh Penyidik Polri
155	Mustofa Kamal, SH	1110220787	Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Aborsi Di Bidang Kesehatan Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
156	Cecilia Soeistiningsih, SH	1210120840	Kebijakan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
157	Rusbesari Kusdiani Putri, SH	1210120848	Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui <i>Restorative Justice</i>
158	Yulia Sa'adah, SH	1210120855	Kebijakan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan
159	Itok Triwiyono, SH	1210120883	Peranan Sketsa Raut Wajah Dalam Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Teroris
160	Kholid Abidin, ST	1210120884	Implementasi Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah
OKTOBER 2014			
161	Agus Susilo Dani, SH	1110220778	Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Anak Didik
162	Andriani Tri Wismintarti, SH	1210120837	Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Kurungan Pengganti Denda dan Pidana Penjara Pengganti Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi
163	Bayu Marwanto, SH	1210120839	Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Di Pengadilan Negeri Semarang

164	Heldan Pramoda Wardhana, S.Pd.Kor	1210120844	Penerapan Mediasi Penal Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang)
165	Mustofa, SH	1210120846	Pertimbangan-Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Sanksi Pidana di Bawah Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
166	Siti Markumah, SH	1210120850	Penegakan hukum Pidana Bagi (Ayah) Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung
167	Utik Basuki Budi Hastuti, SH	1210120852	Pelaksanaan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi
168	Wahyudi, S.Pd	1210120853	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Legislatif Tahun 2014 (Studi Kasus Putusan Nomor : 649/PID.B/2013/PN.SMG)
169	Sus Agus Widoyoko, SH	1210120851	Pembuktian Dakwaan Subsidiaritas Dalam Penerapan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
170	Bambang Winarno, SH	1210120881	Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Yang Dilakukan Oleh Anak
171	Mohamad Ahdi, SH	1210120885	Proses Penyelesaian Perkara Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Di Polres Kabupaten Magelang
172	Narto, SH	1210120887	Proses Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Kepolisian
173	Edy Suryono, SH	1210120890	Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Masih Hubungan Keluarga Dengan Korban
174	Purwanto, SH	1210110891	Proses Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Suami Terhadap Istri Melalui Mediasi Penal Di Polres Magelang
175	Raden Widiyanta, SH	1210120892	Kekuatan Pembuktian Saksi Korban Dalam Proses Pemeriksaan Kecelakaan Lalu Lintas
176	Setyo, SH	1210120893	Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo

177	Soetarno, SH	1210120895	Perlindungan Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Di Wilayah Hukum Polres Magelang Kota
178	Wargo, SH	1210120897	Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak
179	R. Margana, SH	1210120907	Disparitas pidana Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Dengan No.211/PID.SUS/2013/PN.SMG)
180	Kelik Budiono, S.Th	1210120909	Penegakan Kode Etik Profesi Polri Di Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Jawa Tengah
181	Artji Judiols Lattan, SH	1210210916	Pertimbangan-Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana
182	Amalia Galih Wangi, SH	1210220925	Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Dalam Upaya Menarik Diri Dari Kewajiban Dinas
183	EP. Ady Hartanto, S.Si	1210220929	Implementasi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Anggota Yang Melanggar Kode Etik Pada Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jawa Tengah
184	Kukuh Kurniawan, SH	1210220931	Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Setelah Keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah denda Dalam KUHP
185	Suyuti, SH	1210220937	Perpolisian Masyarakat (POLMAS) Sebagai Model Dalam Implementasi Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Di Kepolisian
186	Agus Suryanto, SH	1210220968	Kebijakan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Recidive
APRIL 2015			
187	Esron Sinambela, SH	1210120842	Kebijakan Aplikatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia Di Pengadilan Militer
188	Denny Ocvanes Mulder, SH	1210120902	Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Dana Proyek Pembangunan Jalan
189	Arianto Salkery, SH	1210220926	Kebijakan Diskresi Dalam Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Pada Anak Di Bawah Umur Oleh Penyidik Kepolisian Resor Grobogan

190	Iman Sudyantoro, SH	1210220930	Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya Dalam Mencegah Kecelakaan Lalu Lintas Di Kepolisian Daerah Jawa Tengah
191	Yuniati Dwi Listyorini, SH	1210220939	Kebijakan Kriminal Bagi Pecandu Narkotika Melalui Lembaga Rehabilitasi
192	Syarifudin, SH	1210220964	Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Online)
193	Arif Prasetyo, SH	131003741010013	Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Dalam Perspektif Penyidikan Di Wilayah Hukum Polres Demak
194	Indah Novi Susanti, SH	131003741010019	Implementasi Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif Di Pengadilan Negeri Kendal
195	Kony Hartanto, SH	131003741010020	Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Perkara Tindak Pidana
196	Ricky Ananta, ST	131003741010026	Aspek Perlindungan Terhadap Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Proses Penyidikan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Demak
197	Suwarno, SH	131003741010028	Kajian Yuridis Pengajuan Kasasi Oleh KPK Kepada Mahkamah Agung Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Jakarta (Studi Kasus Putusan No.1611 K/PID.SUS/2013)
198	Tarmizi, SH	131003741010029	Kedudukan Peradilan Militer Sebagai Peradilan Khusus dan Pelaku Kekuasaan Kehakiman
199	Toni Rio Sihar Pakpahan, SH	131003741010031	Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pengungkapan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Kaitannya Dengan Ketentuan Rahasia Bank
OKTOBER 2015			
200	Sugiyarto, SH	1210220936	Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi Di Wilayah Hukum Polres Blora
201	Heru Satriawan, SH	131003741010095	Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Negeri Kendal
APRIL 2016			
202	Andi Dwi Oktavian, SH	131003741010012	Tanggung Jawab Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu Di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang

203	Edwin Apriyanto, SH	131003741010094	Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Di Polrestabes Semarang
204	Kurniawati Dewi, A.Md, IP, SH	131003741010096	Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Narkotika dan Psikotropika Di Lapas Klas IIA Wanita Semarang
205	Rudi Winarno, SH	131003741010098	Efektifitas Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah
206	Vika Viqiana, A.Md, IP, SH	131003741010099	Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang
207	Wahyu Budi Heriyanto, A.Md, IP, SH	131003741010100	Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Terhadap Anak Yang Bekonflik dengan Hukum Di Bapas Klas I Semarang
208	Saiful Buchori, A.Md, IP, SH	131003741010126	Efektivitas Pelaksanaan Asimilasi Sosial Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang
209	Anton Adi Ristanto, A.Md. IP. SH	131003741010129	Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Narapidana (Pemakai/Penyalahguna) Narkotika Oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang
210	Pujiono, SH	141003741010153	Analisis Kebijakan Hukum Pidana Dalam Melindungi Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Kajian Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004)
211	Singgih Andi Saputro, SH	141003741010156	Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kekerasan Seksual Terhadap Anak
212	Sobirin, SH	141003741010157	Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Narkotika
213	Suci Trisnawati, SH	141003741010159	Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Energi Listrik Oleh Masyarakat
214	Sukarno, SH	141003741010161	Implementasi Pasal 44 dan Pasal 43 UU ITE Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Mayantara Yang Berkaitan Dengan Sara (Studi Kasus Putusan No. 10/Pid.Sus/2013/PN.Pt)
215	Zaimatul Chasanah, SHI	141003741010166	Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an

OKTOBER 2016			
216	Aris Sudiyarso, SIK	131003741010014	Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Perkara Pidana Di Polrestabes Semarang
217	Dwi Hantono, SH.I	131003741010016	Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJBC Terhadap Tindak Pidana Khusus Kepabeanaan Dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana Terpadu
218	Suroso, SH	131003741010027	Kebijakan Aplikatif Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
219	S. Utomo, SH	141003741010155	Peran Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kendal
220	Sumondo, SH	141003741010162	Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Bantuan Hukum Di Tingkat Pada Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga (Studi Kasus Polsek Godong dan Karangrayung)
221	Tri Sukapti Handayani, BcIP, SH	141003741010165	Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang
222	Musa'adah, SH	141003741010200	Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Untuk Mencegah Terjadinya Viktimisasi Berulang Pada Proses Penyidikan Di Polrestabes Semarang
223	Herdiawan Arifianto, SH. SIK	141003741010210	Peran Seksi Propam Dalam Penerapan Peraturan Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Pelanggaran Oleh Anggota Di Polres Semarang
224	Subur Subroto, SH	141003741010223	Penanganan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Tanpa SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) Oleh Dit. Pol Air Polda Jateng
225	Sudiyono, SE. SH. Msi. MKn	141003741010224	Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Angsuran Debitur Dengan Modus Pemalsuan Jabatan Dan Dokumen Di Pengadilan Tipikor Semarang
226	Wachyono, SH	141003741010226	Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Prostitusi Online (Cyber) Di Indonesia)
227	Hari Muryanto, SH	141003741010259	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Subsidi Tabung Gas LPG 3 Kg Di Polrestabes Semarang

228	Tri Sutrisno, SH	141003741010260	Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang
APRIL 2017			
229	Amin Mezi Syaifudin, SH	131003741010062	Efektifitas Fungsi Propam Dalam Penegakan Disiplin Anggota Polres Pemalang
230	Joni Priyanto, AKS	131003741010073	Efektifitas Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Dalam Kaitannya Dengan Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana
231	Rani Supriyanto, A.Md., IP., SH.	131003741010080	Efektifitas Program Perawatan Tahanan Di Rumah Tahanan Negara
232	Ranoto, SH	131003741010081	Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pegawai Negeri Sipil Pelaku Tindak Pidana Korupsi
233	Anny Citrariana, SH	141003741010143	Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Cyber
234	Muhammad Maghfurir Rohman, S.SY	141003741010150	Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penodaan Terhadap Agama
235	Ir. Aifi Indrastuty Winoto, SH	141003741010215	Kebijakan Hakim Dalam Menetapkan Berat Ringannya Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana
236	Gijanto, SH	141003741010216	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Menghalangi Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
237	Handoko, SH	141003741010217	Pelaksanaan Penyimpanan Barang Sitaan Perkara Pidana Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Semarang
238	Muhamad Samsul Afandi, SH	141003741010220	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Kawasan Konservasi Taman Nasional Karimunjawa Oleh Balai Taman Nasional Karimunjawa
239	Niarti, SH	141003741010221	Kebijakan Rehabilitasi Bagi Anggota Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
240	Nurul Khaqiqoh, S.Pi	141003741010222	Analisis Yuridis Tindak Pidana Illegal Fishing Menurut Undang-Undang No.45 Th 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

241	Widi Budiarko, SH	141003741010288	Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil
242	Dwi Susanto, SH	141003741010253	Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dan Jaringannya Oleh Densus 88 Pasca Likuidasi
243	Bety Novita Rindarwati, SH	141003741010265	Kebijakan Penyelesaian Kasus Hukum Prajurit Tentara Nasional Indonesia Berkenaan Dengan Tindak Pidana Penganiayaan Di Pengadilan Militer
244	Giri Narwantono, SH	151003741010273	Profesionalitas Penyidikan Tindak Pidana Dalam Rangka Meningkatkan Penyelesaian Perkara Pencurian Kendaraan Bermotor Di Polres Semarang
245	Monita Honeisty BR. Sitorus, SH	151003741010276	Kebijakan Hukum Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Recidive
246	Nofi Ujiati, SH	151003741010277	Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Laka Lantas Menggunakan Restoratif Justice Di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang
247	Paryono, SH	1510037410102278	Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Dengan Kekerasan Di Wilayah hukum Polrestabes Semarang
248	Sulaiman, SH	151003741010281	Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial
249	Taufiqurrohman, SH	151003741010283	Kebijakan Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
250	Tri Retnaningsih, SH	151003741010284	Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap <i>Whistleblower</i> Dan <i>Justice Collaborator</i> Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Sebagai <i>Organized Crime</i>
251	Wahyu Putri Yuliasta, S.Psi	151003741010287	Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Tanah
252	Heru Mulyono, SH	151003741010331	Analisis Yuridis Sidang Perbedaan Pendapat Antara Perwira Penyerah Perkara Dengan Oditur Militer. (Studi Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor : 04-K/PMU/PP/AD/IV/2015)
253	Hangrengga Berlian, SH	151003741010383	Implementasi Kewenangan KPK Dalam Melakukan Koordinasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dengan Kepolisian Dan Kejaksaan

254	Retno Lastiani, SH	151003741010384	Disparitas Penjatuhan Pidana Kurungan Pengganti Denda Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang
255	Joko Ismanto, SH	151003741010385	Diversi Kepolisian Sebagai Penerapan Kebijakan Limitatif Dalam Perkara Pencurian Oleh Anak
OKTOBER 2017			
256	Puji Nurochman, SH	131003741010097	Kebijakan Aplikasi Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Polri Di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Tengah
257	Agus Salim, SH	141003741010142	Efektifitas Penerapan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan No.028/G/2015/PTUN/SMG)
258	Choirotun Nisa' SHI	151003741010268	Proses Penyelesaian Permohonan Grasi Sebagai Upaya Hukum Luar Biasa Terhadap Terpidana Mati
259	Daniel Praditya, SH	151003741010269	Kebijakan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan Aspek Viktimologi Pada Pengadilan Negeri Semarang
260	Dian Dini Analisa, S.Psi	151003741010270	Kebijakan Polda Jateng Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Penyakit Masyarakat
261	Edi Purwanto, SH	151003741010271	Politik Kriminal Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah
262	Mochamad Bagus Setiawan, S.Psi	151003741010275	Kebijakan Penerapan Pidana Penodaan Agama Dalam Pasal 156a KUHP Terhadap Kepentingan Politik
263	Soeyanto, SH	151003741010280	Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Menjalankan Tugas Profesi
264	Tarto Widodo, SE. SH	151003741010282	kebijakan Hukum Pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang
265	Vina Putri Herlinda, S.Psi	151003741010286	Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah
266	Ahada Muhammad Asnan, SH	151003741010346	Kebijakan Diversi Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif Dalam Peradilan Anak

267	Ratna Styawardani, SE. AKT. CA. BKP. CLI. SH	151003741010347	Aplikasi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penetapan Status Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pada Notaris dan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
268	Dyah Puspita Sari, S.Pd	151003741010349	Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan
269	Erlina Setyawati, STP. SE. BKP. B.	151003741010350	Tinjauan Yuridis Kewajiban Verifikasi Dan Validasi Bea Perolehan Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bagi Wajib Pajak Yang Mengikuti Pengampunan Pajak di Kota Semarang
270	Irlina, SH	151003741010352	Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemidanaan Terhadap Anak Yang Diancam Pidana Kumulatif Berupa Penjara Dan Denda
271	Nur Sholikhin, SH	151003741010355	Kebijakan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Di Bawah Batas Minimum Dari Ketentuan Undang-Undang Dalam Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H)
APRIL 2018			
272	Mustofa Ludfi, SH	151003741010354	Tinjauan Yuridis Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Asuransi Fiktif Anggota DPRD Kota Semarang (Studi Kasus Putusan Nomor 104/Pid.SUS-TPK/PN.Smg)
273	Djuni Marheni, SH	151003741010376	Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga
274	Jalal, SH	151003741010382	Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia
275	Achmad Sugeng, SH	161003741010390	Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Untuk Menciptakan Ketertiban Masyarakat Di Wilayah Hukum Polres Salatiga
276	Agus Supriyadi, SE	161003741010392	Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Ancaman Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi
277	Amad Yusub, SHI	161003741010393	Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Dalam Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia
278	Anugrah Indrawan Wijaksana, SH	161003741010394	Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menaggulangi Tindak Pidana Terorisme Di Wilayah Polda Kalimantan Timur
279	Budi Santoso, SH	161003741010395	Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Masih Dibawah Umur Di Wilayah Kepolisian Resor Temanggung

280	Dwi Sutrisno, SH	161003741010396	Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Modus Bertamu Di Wilayah Hukum Polres Berau
281	Dyah Enny Kusuma, SH	161003741010397	Implikasi Yuridis Pengingkaran Keterangan Dalam BAP Oleh Korban / Saksi Di Muka Persidangan (Studi Kasus Putusan Nomor 9/Pid,Sus/2015/PN Ung)
282	Karlen Sitopu, SH	161003741010401	Tinjauan Yuridis Dampak Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi
283	Kristianto, SH	161003741010402	Kebijakan Polda Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Obat Terlarang Di Jawa Tengah
284	Nugroho Argo Wibowo, SH	161003741010406	Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana
285	Richardus Helmy Hartandya, SH	161003741010407	Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Anak Yang Melakukan Tindak Pidana
286	Zaenul Arifin, SHI	161003741010411	Implementasi Penjatuhan Sanksi Pidana Uang Pengganti Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan Di Pengadilan Negeri Blora
287	Hudiono, SH	161003741010438	Tinjauan Yuridis Penyelesaian Tindak Pidana Anak Melalui Restorative Justice Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.KDL
288	Satria Kusuma Pinanditha, SH	161003741010521	Penerapan Pidana Denda Dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Pengendara Sepeda Motor Di Kota Tegal
OKTOBER 2018			
289	Dervina Ratih Andan Pratiwi, SH	161003741010459	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
290	Agus Triyanto, SH	161003741010469	Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penempatan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri
291	Akhiyar, SH	161003741010470	Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Di Polrestabes Semarang

292	Bambang Purwanto, SH	161003741010471	Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Dengan Sarana Mesin Mickey Mouse
293	Bina Cakra Wibowo, SH	161003741010472	Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Jawa Tengah
294	Haningtyas Setyo Nugraheni, SH	161003741010475	Rekonstruksi Pengelolaan Tukar Menukar Aset Tanah Desa Di Wilayah Kabupaten Kendal
295	Hendri Wijanarko, SH	161003741010476	Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pemidanaan Yang Tidak Disertai Perintah Penahanan Sesuai Kitab Undnag-Undnag Hukum Acara Pidana
296	Ricki Sari Hartono, SH	161003741010480	Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Di Polda Jawa Tengah
297	Sapto Yuhanis, SH	161003741010481	Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Meninggal Dunia Melalui Alternative Dispute Resolution
298	Sorrenti Dian Anggraeni, SH	161003741010483	Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanganan Pelanggaran Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Yang Tidak Dilengkapi Dokumen
299	Abdul Mutholib, SH	161003741010508	Perlindungan Hak Anak Dalam Penanganan Tindak Pidana Pedofilia
300	Imam Muhtadi, SH	161003741010510	Kebijakan Hukum Pidana Pada Satuan Reserse Kriminal Dalam Opsai Gabungan Lalu Lintas Sebagai Upaya Meminimalisasi Kriminalitas
301	Totok Guranto, SH	161003741010511	Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Polda Jateng
302	Farauq Wahyudiyanto, SH	161003741010515	Perlindungan Hukum Anak Jalanan Atas Eksploitasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Daerah Kendal